



► PENDAPATAN DAERAH

Pemda Harus Optimalkan CSR untuk Alternatif PAD

DANUREJAN—Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mengapresiasi langkah pemerintah kabupaten/kota di DIY yang tidak menaikkan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2). Mengenai alternatif pendapatan, Dewan mendorong pemerintah mencari sumber pendapatan lain.

Salah satu caranya adalah mengoptimalkan pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility*

(CSR) dari berbagai perusahaan.

Menurut Eko, kondisi ekonomi masyarakat DIY saat ini perlu mendapat perhatian lebih, sehingga penambahan beban pajak bukanlah pilihan tepat.

"Masyarakat DIY dari sisi ekonomi perlu dibantu. Caranya bagaimana? Dengan tidak dibebani tambahan pajak, termasuk kabupaten/kota untuk tidak menaikkan PBB," ujar Eko Suwanto, Selasa (19/8). Menurutnya, CSR dapat

dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan pembangunan, termasuk program sosial. Ia mencontohkan Kota Jogja yang menjalankan program bedah rumah melalui CSR tanpa menggunakan APBD.

Selain itu, kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) juga bisa diperkuat untuk mendukung perbaikan rumah ibadah maupun rumah warga yang tidak layak huni. "Kita pernah mengalami pada

2006 yakni saat terjadi gempa, duit enggak ada, kemudian swasta membantu. Termasuk saat erupsi Merapi, di mana pembangunan hunian tetap tidak menggunakan APBD. Huntap dibangun menggunakan dana gotong-royong dari masyarakat," kata Eko.

Ia meyakini partisipasi masyarakat dan dunia usaha masih bisa dimaksimalkan. Perusahaan BUMN, BUMD, maupun perusahaan

asing yang beroperasi di Jogja, menurutnya, dapat menopang pembangunan daerah melalui CSR.

Eko juga menilai bahwa selama ini Pemda DIY sudah cukup baik dalam mendorong keterlibatan swasta. Namun, ia menegaskan agar langkah tersebut diperkuat. "Sudah bagus, hanya perlu diperbagus lagi," katanya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pembukuan, Penagihan dan

Pengembangan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Jogja, Kisbiyantoro menyebut Pemkot Jogja tidak menaikkan PBB tahun ini. Dia menyebut kenaikan PBB di Kota Jogja terakhir dilakukan pada 2020. "Nilai Jual Objek Pajak [NJOP] PBB-P2 tetap sama seperti 2024. Hanya stimulus yang dikurangi," katanya, Jumat (15/8). *(Ariq Fajar Hidayat)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005